



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohanes Wahyu Widiasmoro, S.IP., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPD RI  
selaku Sekretaris Jenderal DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 11 Mei 2026

**PIHAK KEDUA**



H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.  
NRP. 70070207

**PIHAK PERTAMA**



Yohanes Wahyu Widiasmoro, S.IP., M.Si.  
NIP. 197606082007011002



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR DPD RI DI IBU KOTA PROVINSI JAWA TENGAH**

| No | Sasaran Kinerja                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                          | 4      |
| 1  | Terwujudnya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah                                                       | Persentase Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang sesuai dengan kewenangan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Tengah                                          | 100%   |
| 2  | Terwujudnya Pengelolaan Data terkait Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi terkait Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Tengah | 100%   |
| 3  | Terwujudnya tata kelola DPD RI di Ibukota Provinsi yang efektif                                              | Persentase terlaksananya dukungan manajemen Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Tengah                                                                                  | 100%   |

**Kegiatan / RO**

**Anggaran**

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. Pengelolaan dukungan administrasi di Daerah Pemilihan</b> | <b>Rp 32.576.000</b>  |
| 1 001 - Laporan Materi Pengolahan Asmasda                       | Rp                    |
| 2 001 - Laporan atas Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda | Rp                    |
| 3 CF.7983.PBC.001.051– Pengolahan Data Asmasda                  | Rp 16.880.000         |
| 4 CF.7984.PBC.001.051 – Telaah Asmasda untuk 32 Provinsi        | Rp 15.696.000         |
| <b>B. Pengelolaan dukungan administrasi di Daerah Pemilihan</b> | <b>Rp 378.379.000</b> |
| 1 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi               | Rp                    |
| 2 959 - Layanan Protokoler                                      | Rp                    |
| 3 962 - Layanan Umum                                            | Rp                    |
| 4 994 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor                     | Rp 378.379.000        |
| 5 951 - Layanan Sarana Internal                                 | Rp                    |
| 6 971 - Layanan Prasarana Internal                              | Rp                    |

Jakarta, 11 Mei 2026

**PIHAK KEDUA**



H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.  
NRP. 70070207

**PIHAK PERTAMA**



Yohanes Wahyu Widiasmoro, S.IP., M.Si.  
NIP. 197606082007011002